



Analisa Transnational Advocacy Network : Transnasionalisme Redress Movement for Comfort Women di Negara Barat oleh The Korean Council 2015-2021

Helga Prashernanda, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian
Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto , SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465405 Faksimile (024) 7465405

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Within the history of Japanese Colonization, follows establishment of Japanese Military Sexual System. Japanese action trigger transnational movement who gave demands for Japan to redress, but have not accomplished until this time. There are attempts to made an issue's settlement through Japan-ROK Agreement 2015, however The Redress Movement for Comfort Women in western country still giving their efforts, and there is fresh establishment of new NGO after Agreement accomplished. The purpose of this research is to examine transnationalization's process of Redress Movement for Comfort Women in the West Country. To analyze the process of transnationalism of Redress Movement for Comfort Women, this research use Transnational Advocacy Network (TAN) approach and Boomerang Pattern Concept. This research have two argument, first argument saying that transnationalism of Redress Movement for Comfort Women in western countries are caused by implementation of TAN and Boomerang Pattern by The Korean Council. The Korean Council must implementing TAN Strategy due to Blockage has given by the Government of Japan and South Korea.

Keywords : *Transnational Advocacy Network, Boomerang Pattern, Redress Movement for Comfort Women, Japan Colonialization*

PENDAHULUAN

Comfort Women juga biasa dikenal dengan istilah *Jugun Ianfu* atau *Ilbonkun Wianbu*, merupakan istilah yang ditujukan bagi para wanita yang direkrut oleh tentara militer Jepang untuk menjadi budak seksual militer Jepang (Soh, 1996: 1227–1229). *Comfort Women* berasal dari negara-negara yang dijajah Jepang, seperti Korea, Taiwan, Filipina, Indonesia, Burma, dan Thailand (Soh, 1996: 1226–1227). Para Wanita tersebut direkrut secara paksa dan menggunakan taktik tipu daya seperti tawaran beasiswa atau tawaran bekerja, yang menolak akan mendapatkan ancaman disiksa dan dibunuh (Tanaka, 2018: 43–74). Para wanita yang direkrut untuk menjadi *Comfort Women* berumur 12 hingga 25 tahun, dengan asumsi bahwa wanita di umur tersebut belum pernah melakukan hubungan seksual, sehingga dapat mencegah penularan penyakit kelamin di kalangan tentara militer Jepang (Qiu et al., 2013: 59–61). Diantara negara lain yang dijajah Jepang, Semenanjung Korea memiliki jumlah *Comfort Women* paling banyak yakni berkisar 200.000 jiwa (Min, 2003: 938). *Comfort Women* dari Semenanjung Korea berkisar 80% dari total keseluruhan jumlah *Comfort Women* yang ada (Soh, 1996: 1226–1227).

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan isu Comfort Women, baik yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor non-negara. Upaya aktor negara yakni melalui perjanjian *The Basic Treaty* tahun 1965, *Kono Statement* 1993, *Asian Women's Fund* di tahun 1995, dan yang terakhir yakni *Japan-ROK Agreement* 2015. Upaya aktor non negara untuk menyelesaikan isu Comfort Women diwakili dalam pergerakan *Redress Movement for Comfort Women* (RMCW). RMCW bertujuan untuk menuntut pertanggung jawaban Jepang atas kejahatan Perbudakan Seksual pada masa penjajahan (Min, 2003: 939). Dalam mencapai tujuan tersebut, pada tahun 1995 dilangsungkan konferensi '*Asian Women Solidarity Forum*' di Seoul, yang diikuti oleh Aktivis dan NGO dari Jepang, Taiwan, Filipina, Korea, Thailand (Soh, 1996: 1237).

Pada tahun 1990, di Korea Selatan terbentuk NGO yang mewakili RMCW dinegaranya dengan nama *The Korean Council for the women drafted for Military Sexual Slavery by Japan*, atau yang lebih dikenal dengan KCWS (Min, 2003: 941). Kemudian pada tahun 2016 terbentuk NGO baru di Korea Selatan dengan nama *The Foundation for Justice and Remembrance for The Issue of Military Sexual Slavery by Japan*, bertujuan untuk menggagalkan perjanjian *Japan-ROK Agreement 2015*. Dua NGO di Korea Selatan tersebut kemudian digabungkan menjadi *The Korean Council for Justice and Remembrance for the Issue of Military Sexual Slavery by Japan*, yang disingkat menjadi The Korean Council (The Korean Council, 2020a: 9). The Korean Council (TKC) melakukan beberapa upaya, salah satunya yakni dengan mendirikan patung perdamaian di depan Kedutaan Besar Jepang yang ada di Seoul pada tahun 2011, yang kemudian terus berkembang hingga didirikannya patung perdamaian di San Francisco pada tahun 2017 (BBC, 2017). Pendirian patung tersebut berdampak pada putusnya hubungan *sister city* antara Osaka dan San Francisco (McCurry, 2018).

Terdapat *fenomena gap*, dimana pada tahun 2016 dibentuk NGO yang baru didirikan dengan tujuan untuk menggagalkan perjanjian *Japan-ROK Agreement 2015*. Kemudian pada tahun 1955 pergerakan RMCW yang semula tersegmentasi pada negara-negara yang dijajah Jepang saja, dengan adanya pendirian patung perdamaian di San Francisco pada tahun 2017 membantah premis sebelumnya. Pergerakan RMCW tersebar dinegara-negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman dan Australia yang ditandai dengan pendirian patung perdamaian (The Korean Council, 2020a: 119–122). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses transnasionalisme pergerakan *Redress Movement for Comfort Women* di negara barat yang dilakukan oleh *The Korean Council* setelah perjanjian *Japan-ROK Agreement 2015* terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Transnational Advocacy Network (TAN) yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data primer yang didapatkan melalui *Forum Group Discussion* dalam Acara "The Korean Council Webinar Series" yang diadakan oleh The Korean Council dan data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis *Process-tracing*, melacak variabel antara atau *variable intervening* yang menjembatani hubungan kasualitas antara variabel independen dan variabel dependen (Rosyidin, 2019: 62–63).

Keck dan Sikkink (2014) menjelaskan bahwa TAN merupakan jejaring advokasi yang dibangun berdasarkan pertukaran informasi antar aktor-non negara diluar batas negaranya, yang memiliki nilai dan tujuan yang sama. Terdapat tujuh aktor non negara yakni Yayasan, NGO domestik dan Internasional, Pergerakan Sosial, Ahli dan Peneliti, Buruh, pemerintah dan pelaku bisnis, Media, dan yang terakhir adalah organisasi keagamaan. Isu yang diperjuangkan dalam TAN, merupakan isu yang bersifat global seperti HAM dan lingkungan. Cara kerja TAN dapat dijelaskan dalam skema *boomerang pattern*, dimana TAN dapat terjadi ketika pergerakan sosial domestik suatu negara dibatasi oleh pemerintahnya sendiri, sehingga pergerakan sosial tersebut perlu mencari bantuan aktor yang lebih kuat diluar batas negaranya, agar mampu memberikan balasan tekanan ke pemerintah di negaranya. Tekanan tersebut ditujukan agar

tercapainya *political effectiveness*, yakni perubahan sikap dan kebijakan dari pemerintah yang memberikan *Blockage*. Untuk mampu mendapatkan pengaruh dan bantuan dari aktor lain yang lebih kuat, NGO atau pergerakan domestik perlu mengimplementasikan empat strategi TAN, yakni; (1) *Information Politics*, merupakan kemampuan memobilisasi informasi yang faktual dan aktual dengan tujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap suatu isu, yang biasanya menggunakan media sebagai alat penyebaran informasi; (2) *Symbolic Politics*, strategi menggunakan ide, benda atau acara tertentu yang dapat merepresentasikan sebuah isu, sehingga lebih mudah menarik perhatian masyarakat dan lebih mudah dipahami masyarakat; (3) *Leverage Politics*, kemampuan untuk menyebarkan dan mendapatkan pengaruh dari aktor yang lebih kuat diluar batas negara untuk memberikan tekanan pada negara yang ditargetkan, sehingga dapat mengubah sikap dan kebijakan pemerintah yang ditargetkan; (4) *Accountability Politics*, kemampuan untuk menekan dan mendapatkan komitmen dari negara yang ditargetkan untuk merubah kebijakannya.

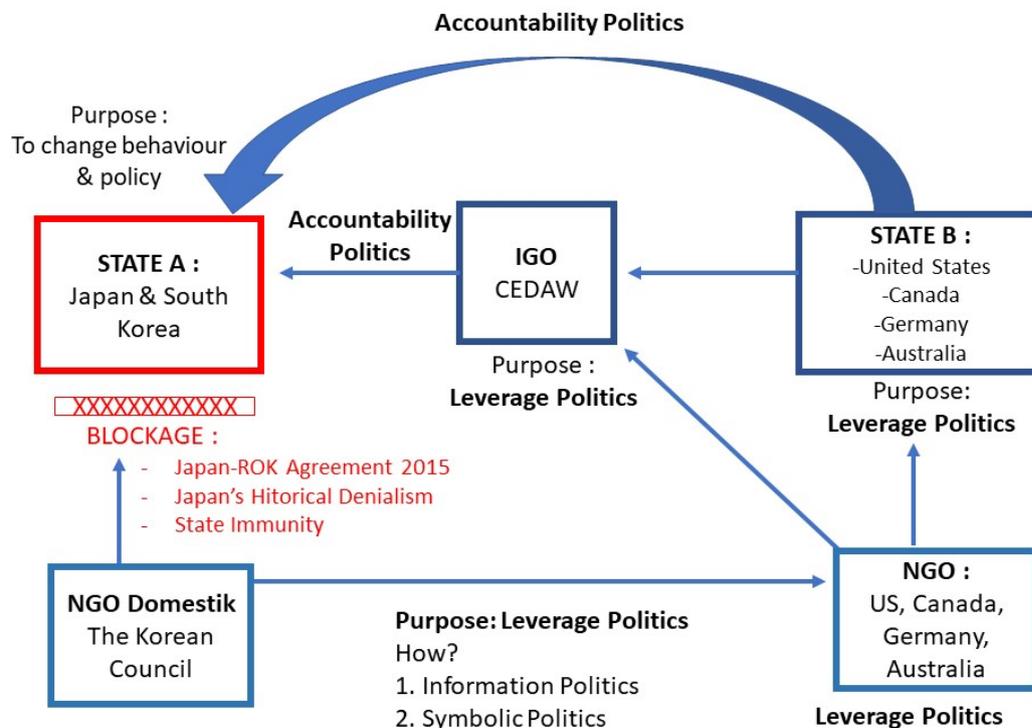
PEMBAHASAN

NGO The Korean Council (TKC) melakukan transnasionalisme pergerakan Redress Movement for Comfort Women (RMCW) ke negara-negara barat dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dan pengaruh dari aktor yang lebih kuat. Upaya ini perlu dilakukan oleh TKC karena adanya *Blockage* yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Beberapa *blockage* yang dimaksud yakni *Japan-ROK Agreement 2015*, penerapan *State Immunity* yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan terhadap pemerintah Jepang, dan sikap *historical denialism* Jepang terhadap isu Comfort Women. Pemberian *State Immunity* oleh pemerintah Korea Selatan, memberikan kekebalan hukum bagi pemerintah Jepang. Akibatnya, gugatan masyarakat untuk meminta ganti rugi ke pemerintah Jepang terhadap isu Comfort Women ditolak oleh pengadilan tinggi pusat di Seoul (Shin, 2021). *Blockage* ini mempersempit ruang gerak pergerakan RMCW di Korea Selatan, serta mengindikasikan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak memprioritaskan perlindungan HAM bagi warga negaranya.

Japan-ROK Agreement 2015 dan sikap *historical denialism* Jepang bertolak belakang terhadap tujuh poin tuntutan yang diberikan oleh pergerakan RMCW. Tujuh poin tuntutan dalam pergerakan RMCW yakni 1) Permintaan maaf secara resmi oleh pemerintah Jepang; 2) Mengakui kejahatan yang dilakukan; 3) Investigasi dan mengungkap pelaku-pelaku dibalik kejahatan; 4) Hukuman untuk para pelaku; 5) Edukasi Publik mengenai sejarah Comfort Women; 6) Hak didirikannya museum dan patung memorial; 7) Pemberian uang kompensasi legal dari pemerintah Jepang (The Korean Council, n.d.-b). Pada perjanjian tahun 2015 menginginkan agar patung perdamaian dicabut atau dipindahkan, bertolak belakang dengan tuntutan nomor lima dan enam. Menurut laporan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2021: 3–4) Jepang tidak mengakui sejarah dan istilah perbudakan seksual militer Jepang. Sikap tersebut bertolak belakang dengan tuntutan nomor satu dan dua. Dalam perjanjian, Jepang juga melarang isu Comfort Women dibahas kembali ke ranah Internasional seperti PBB dan dianggap sebagai perjanjian '*Final and Irreversible*'. Isi perjanjian yang bertolak belakang dengan tuntutan pergerakan, menandakan bahwa dalam melakukan kesepakatan tidak menggunakan pendekatan *Victim Center Approach* (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2016: 8–9). Semua *blockage* yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan berdampak pada pemberian ruang yang terbatas bagi pergerakan RMCW di Korea Selatan untuk mendapat keadilan.

Dengan adanya *Blockage* tersebut, menghalangi tujuan TKC untuk mendapatkan keadilan yang diinginkan atau tercapainya tujuh poin tuntutan. Akibatnya, TKC perlu mencari jalan alternatif yakni dengan mengimplementasikan skema *Boomerang Pattern*, untuk dapat menekan pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Tekanan diperlukan agar strategi

Accountability Politics dapat terimplementasi, yakni adanya perubahan sikap dan kebijakan pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Tekanan dapat diberikan ketika *strategi Leverage Politics* terimplementasi dengan baik, yakni ketika mendapatkan bantuan dan pengaruh dari aktor diluar batas negara yang lebih kuat. Untuk dapat membangun jejaring transnasional, TKC perlu mengimplementasikan strategi *Information Politics* dan *Symbolic Politics* terlebih dahulu.



Gambar 1. Boomerang Pattern Redress Movement for Comfort Women ke negara barat yang diimplementasi oleh The Korean Council

Sumber : (Margareth E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014), Gambar telah diolah kembali

TKC mengimplementasikan strategi *Information Politics* dengan cara menyusun dan mempublikasi buku digital yang berjudul “A to Z Guide for just Resolution of the Japanese Military Sexual Slavery Issue” (The Korean Council, 2020a). Kedua, mengadakan seminar. Serta bekerja sama dengan NGO Education for Social and Justice Foundation, dan universitas UC Berkeley dan San Francisco State University (The Korean Council, n.d.-a). TKC juga mengadakan “The Korean Council Webinar Series” pada 22 dan 29 Oktober 2021, dengan mengundang berbagai narasumber dari Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Ketiga, menggunakan media sebagai alat untuk menyebarkan informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk tercapainya keadilan dalam isu Comfort Women. Media ‘Asian Boss’ meliput testimoni dari para *Survivors* dan disebar-luaskan ke berbagai media yang dimiliki perusahaan tersebut. Keempat, TKC membuat website dan media sosial bernama “@war_women” yang memudahkan pertukaran akses informasi terkini.

Dalam strategi *Information politics*, The Korean Council menggunakan nilai-nilai HAM sebagai bingkai penyebaran informasi. Dalam penyebaran informasi menggunakan data yang kredibel dari bukti penelitian yang ada, faktual dan aktual. Data primer di dapatkan melalui wawancara dan testimoni dari para *Survivors*. Data Sekunder didapatkan melalui buku,

jurnal, berita dan rekomendasi dari IGO (*International Organization*). Menurut (Margareth E. Keck & Kathryn Sikkink, 2014) penting untuk melaporkan fakta dan sumber kredibel untuk membuat perubahan dan membangun kesadaran masyarakat. Peran testimoni dan media mampu untuk merubah informasi menjadi kekuatan kolektif.

TKC mengimplementasi strategi *Symbolic Politics* dengan berbagai cara seperti mendirikan patung perdamaian, mengadakan pendanaan kolektif melalui program *Butterfly Fund*, membuat Film Dokumentar, melaksanakan Wednesday Demonstration, dan memberikan beasiswa. Patung perdamaian pertama kali didirikan di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul pada tahun 2011 saat merayakan *Wednesday Demonstration* ke-1000 (The Korean Council, 2011). Patung perdamaian memiliki bentuk wanita Comfort Women yang mengepalkan tangannya dan duduk disebuah kursi dengan tatapan lirih, yang didirikan sebagai simbol perjuangan dan penantian untuk mendapatkan keadilan bagi para Comfort Women, serta bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai isu perbudakan seksual dan HAM (The Korean Council, 2020a: 118–122). Pemberian nama ‘perdamaian’ juga memiliki makna sebagai tujuan yang ingin disampaikan melalui pendirian patung. Menurut Kaufman (2019), pemberian nama (Rename) dan membingkai isu (Reframe), akan mendorong pergerakan dan aksi kolektif, karena penggunaan simbolik politik dapat menimbulkan interpretasi dan relevansi yang kemudian mendorong tindakan dan perilaku masyarakat untuk ikut serta.

Kedua, *Butterfly Funds* merupakan penggalangan dana yang dilakukan oleh The Korean Council untuk diberikan kepada korban kekerasan seksual yang masih berjuang dalam peperangan atau konflik bersenjata. Para wanita dan anak-anak di Uganda, Vietnam, Republik Kongo, Palestina, Iraq dan Nigeria mendapatkan bantuan dana dari The Korean Council (The Korean Council, 2020a: 145). Hasil donasi tersebut juga dipergunakan untuk membangun kesadaran masyarakat internasional, seperti memberangkatkan Survivors ke negara-negara lain untuk ikut serta dalam konferensi seperti Konferensi HAM Dunia di Vienna, Konferensi Asian Solidarity Forum dan seminar di sekolah hingga perguruan tinggi. Selain itu, penggalangan dana juga telah digunakan untuk membangun patung perdamaian di Dresden (Jerman) dan di Chicago. Ketiga, Pembuatan film dokumenter yang berjudul “*My Name is Kim Bok Dong*” dan penayangan film dokumenter lain, yang ditayangkan dalam acara Internasional seperti UNHCR pada 8 Agustus 2019 dan pada kunjungan di berbagai negara bagian di Amerika Serikat (The Korean Council, 2020a: 214). Keempat, *Wednesday Demonstration* yakni demonstrasi yang dilakukan setiap hari Rabu untuk mengkampanyekan isu Comfort Women serta meminta pemerintah Jepang agar mengimplementasikan tujuh tuntutan. Para demonstran menuliskan slogan dan berteriak “meminta maaf!” “dihukum!” “ganti rugi!” (Soh, 1996: 1235). Sebutan “Wednesday Demonstration” dan Slogan yang diteriakan oleh demonstration merupakan bagian dari simbolik politik melalui bahasa dan narasi. Dalam politik, penting untuk dapat menginterpretasikan symbol, bahasa, narasi, kiasan retorik, paradoks, hal yang bersifat ambigu dan kontradiksi (Burnier, 1994).

Yang terakhir, TKC mengadakan program beasiswa, nama program beasiswanya diambil dari nama *Survivors* dengan nama *Anjeomsun Scholarship*, *Marimond Peace Gardner Scholarship*, *Lee-Soon Deok Scholarship*, *Kang Deok-Kyung Scholarship* dan *Kim-Hak Sun Scholarship*. Diversifikasi beasiswa dalam segmen yang berbeda bertujuan untuk melahirkan penerus pergerakan RMCW melalui bidang yang berbeda-beda. Menurut Laurance Cox (2015) pemberian beasiswa merupakan strategi pergerakan sosial yang berfungsi sebagai penghasil pengetahuan baru yang inovatif dan *organic intellectuals* yakni aktivis berintelektual yang tumbuh dari kelompok pergerakan sosial. Saat memberikan beasiswa kepada penerima beasiswa *Kim Hak Sun*, The Korean Council memberikan pernyataan “*I hope that the life and story of Seohyun Lee will help grandmother’s life to be remembered and continued, and I will always support her solidarity of memory of justice*” (The Korean Council, 2020b). Pemberian

beasiswa juga ditujukan sebagai sarana agar penerima beasiswa dapat memberikan kontribusi kembali kepada pergerakan RMCW di Korea Selatan.

Strategi *Information Politics* dan *Symbolic Politics* yang telah diimplementasi oleh TKC, menghasilkan jejaring transnasional yang terbangun dengan sembilan NGO di negara barat. Terdapat lima NGO dari Amerika Serikat, yakni *Washington Coalition for Comfort Women Issues* (WCCW), *Comfort Women Justice Coalition* (CWJC), *Comfort Women Action for Redress and Education* (CARE), *Education for Social Justice Foundation* (ESJF), *Korean American Women in Need* (Kan-Win). Satu NGO di Kanada, yakni *Alpha Education*. Satu NGO di Jerman yakni *Korea Verband*. Dua NGO di Australia, yakni *Friends of Comfort Women in Sydney* (FCWS) dan *Friends of Comfort Women in Melbourne* (FCWM), keduanya didirikan tahun 2016. Beberapa NGO tersebut telah didirikan cukup lama dan beberapa diantaranya didirikan setelah perjanjian tahun 2015 dilakukan, namun semua NGO tersebut sama-sama memberikan pernyataan penolakan dan memberikan berbagai upaya perlawanan terhadap perjanjian Japan-ROK agreement. Upaya perlawanan tersebut dilakukan dengan cara mengimplementasikan strategi *Information Politics* dan *Symbolic Politics*.

Negara	NGO	<i>Information Politics</i>	<i>Symbolic Politics</i>
Washington, Amerika Serikat	WCCW (Washington Coalition for Comfort Women Issues)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan informasi melalui website dan media sosial instagram "<i>Comfort Women Justice Coalition</i>" 2. Membuat dan Mempublikasikan buku "<i>Curriculum and Resource for 'Comfort Women' Education (for highschool)</i>" 3. Membuat buku "<i>The Transnational Redress Movement for The Victims of Japanese Military Sexual Slavery</i>" bersama dengan NGO lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian monumen comfort women tahun 2010 di Palisades Park 2. Pemutaran Film "<i>Dai Han</i>" dan "<i>Spirits Homecoming</i>"
San Francisco, Amerika Serikat	CWJC (Comfort Women Justice Coalition)	<ol style="list-style-type: none"> 1. website dan media sosial "<i>Comfort Women Justice Coalition</i>" 2. Membuat dan Mempublikasikan buku "<i>Curriculum and Resource for 'Comfort Women' Education (for highschool)</i>" 3. Membuat Reading List (Referensi berbagai buku yang membahas Comfort Women) 4. Membuka ruang diskusi (grup facebook) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan patung memorial di <i>Saint Mary's Square</i> 2. Pameran dan Lomba kesenian patung dengan tema Comfort Women 3. Donasi
Glendale, California,	CARE (Comfort Women)	<ol style="list-style-type: none"> 1. website dan media sosial Instagram "<i>Comfort Women Action</i>" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Patung Perdamaian 2. Lomba essay mengenai

Amerika Serikat	Action for Redress and Education)	2. Membuat arsip digital tentang sumber dan dokumen perbudakan Jepang, bersama UCLA (University of California, Los Angeles) 3. Membuat buku sejarah untuk anak-anak SMA " <i>Curriculum and Resource for 'Comfort Women' Education</i> (for highschool)"	Comfort Women 3. Donasi 4. Membuat petisi untuk ICJ, UNESCO, Pemerintah Jepang
San Francisco, Amerika Serikat	Education for Social Justice Foundation	1. Website " <i>Education for Social Justice Foundation</i> " 2. Mempublikasi buku " <i>Comfort Women History and Issues : Teacher Resource Guide</i> ". 3. Workshop for Educators (High School) & Lectures (Colleges, University, Conferences)	1. Donasi 2. Pameran Seni
Chicago	Kan-Win Comfort Women	1. Website & Media Sosial " <i>Kan-Win</i> " 2. Magazine 3. Memberikan pogram edukasi kepada para pemuda, sekolah atau universitas	1. Mendirikan patung perdamaian 2. Pameran dengan Awakenings Gallery 3. Donasi
Berlin, Jerman	Korea Verband	1. Website dan Media Sosial " <i>Korea Verband</i> " 2. Education and Public Awareness through Action Week 2011 3. Magazine 4. Conferences 5. Seminar 6. International Symposium	1. Donasi 2. Pendirian patung perdamaian di Wiesent, Berlin 3. Film Series 4. Demonstration
Canada	Alpha Education	1. Membuat website " <i>Alpha Education</i> " 2. melakukan penelitian dan mempublikasikan buku 3. Membuka kelas edukasi bimbingan penulisan ilmiah 4. Membuat laporan tahunan	1. Youth Project & Leadership 2. Membuat Patung Memorial 3. Galeri Seni Virtual & The Asia Pacific Peace Museum
Sidney, Australia	Friends of Comfort Women in Sydney	1. Membuat Website dan Media Sosial " <i>FCWS_AU</i> " 2. Membuat ruang diskusi di grup Facebook	1. Membangun Patung Perdamaian 2. Donasi 3. Demonstrasi
Melbourne, Australia	Friends if Comfort	1. Membuat Website dan Media Sosial " <i>FCWM_AU</i> "	1. Mendirikan patung perdamaian

	Women in Melbourne	2. Festival makanan Korea 3. Menyiarkan film 'I Can Speak'
--	--------------------	---

Tabel 1. Implementasi Strategi *Information Politics* dan *Symbolic Politics* oleh jejaring RMCW di negara barat
Sumber : Nama NGO didapatkan dari *The Korean Council* pada acara *The Korean Council Webinar Series*, tabel diolah melalui hasil pengamatan melalui laman internet dan media sosial setiap NGO

Meski sudah ada perjanjian tahun 2015, NGO di negara barat tetap ikut serta melakukan pergerakan RMCW kembali dan mengkampanyekan tujuh tuntutan pergerakan RMCW, dengan tujuan mendapatkan keadilan dan perdamaian bagi Comfort Women. TKC berhasil mengimplementasikan strategi *Leverage Politics*, jejaring yang dibangun dengan NGO dinegara barat. NGO di negara barat ikut serta mengimplementasikan strategi *Information Politics* dan *Symbolic Politics*. Dua strategi tersebut juga diimplementasi NGO dinegara barat untuk melakukan *Leverage Politics* ke pemerintah di negaranya, sehingga mendapatkan atensi dan pengaruh dari pemerintah negaranya. Keikutsertaan pemerintah dinegara barat berperan penting untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Tekanan yang mampu diberikan oleh pemerintah negara barat kepada pemerintah Jepang yakni perijinan pendirian patung perdamaian (Statue of Peace) dan Monumen memorial Comfort Women (Memorial Statue) yang kini telah didirikan di beberapa negara barat. Hingga saat ini terdapat 23 Patung yang tersebar di negara Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Australia (The Korean Council, 2020a: 119–122)

NGO di negara barat berhasil melakukan *leverage politics* ke pemerintah di negaranya ketika mampu ikut serta dalam ranah politik atau ikut serta dalam agenda setting. Pada tahun 2015, NGO di San Francisco ikut serta dalam agenda setting pembangunan monumen yang kemudian disetujui oleh Comfort Women *San Francisco Board of Supervisors* (BBC, 2017). Dimanapun terdapat pendirian patung, pemerintah Jepang berupaya untuk melakukan dialog dengan pemerintah terkait agar patung tersebut dicabut atau dipindahkan. Pemerintah Jepang berupaya melakukan intervensi ke Walikota Distrik Mitte di Jerman agar mencabut patung perdamaian yang berada di tengah pusat kota, dengan argumen bahwa patung tersebut menimbulkan sentimen anti-jepang. Upaya Jepang tersebut gagal, hingga saat ini patung perdamaian tetap berdiri di tengah taman pusat kota Berlin. Walikota Distrik Mitte, menekankan “ pentingnya kesempatan untuk membahas kekerasan seksual di masa konflik militer dan ataupun masa kini” (Junichiro, 2021). Persetujuan atas didirikannya patung perdamaian sebagai pernyataan pemerintah memerangi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata (APNews, 2020). Dalam pemberian ijin pendirian patung, menandakan pemerintah negara ikut mendukung *Redress Movement for Comfort Women*. Pemerintah San Francisco memutuskan untuk tetap mendirikan patung monument Comfort Women, meski berdampak pada putusnya hubungan *Sister City* antara San Francisco dan Osaka (McCurry, 2018). Keputusan tersebut dilandaskan argument bahwa patung perdamaian sebagai sarana pemberian edukasi masyarakat untuk menghentikan perdagangan manusia global, khususnya perdagangan perempuan dan anak-anak (Board of Supervisors of the City and the County of San Francisco, 2021: 2).

NGO di negara barat tidak hanya melakukan *leverage politics* ke pemerintahnya saja, tetapi juga ke IGO (*Intergovernmental Organization*). WCCW memberikan pernyataan kekecewaan terhadap perjanjian tersebut di press konferensi PBB pada 8 Maret 2016, yang diikuti oleh CEDAW, KACE, KAFC, *Coalition of Trafficking Against Women* (Lee & Ham, 2020: 121–133). NGO dalam pergerakan RMCW mengirimkan laporan perkembangan penyelesaian isu Comfort Women setiap tahunnya (CEDAW, 2009: 23). CEDAW memberikan tekanan ke pemerintah Jepang dan Korea Selatan, menyayangkan perjanjian Japan-ROK Agreement yang tidak menerapkan pendekatan *Victim Centered Approach* (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2016: 8–9). Pada laporan

(CEDAW/C/JPN/CO) meminta kepada Pemerintah Jepang dan Korea Selatan untuk patuh pada hukum internasional tentang HAM dan segera menyelesaikan isu Comfort Women dengan mengimplementasikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite (Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), 2016).

The Korean Council berhasil membangun dari jejaring transnasional, baik dari NGO di negara barat, pemerintah negara barat dan organisasi internasional seperti CEDAW yang ikut memberikan tekanan pada pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Hasil dari tekanan tersebut, terdapat perubahan sikap dari pemerintah Korea Selatan. Pada 14 Agustus 2021, Presiden Moon Jae In memberikan pernyataan menolak perjanjian Japan-ROK Agreement tahun 2015 karena sepakat dengan resolusi yang diberikan oleh Institusi Internasional untuk menyelesaikan permasalahan yang berorientasi pada korban (Yonhap, 2021). Disisi lain, Jepang belum menunjukkan perubahan sikap dan kebijakan terkait isu Comfort Women maupun Perjanjian tahun 2015, dibuktikan dengan sikap Jepang yang menolak kata perbudakan pada laporan Menteri Luar Negeri Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2021: 3–4). Menurut Broad & Turnbull (2019) istilah perbudakan memberikan tekanan emosional dan menarik perhatian publik karena melihat melalui moralitas sebagai nilai dasar, sehingga mampu melakukan intervensi kebijakan. Pemberian istilah perbudakan cukup memberikan tekanan kepada pemerintah Jepang. Meski pemerintah Korea Selatan menunjukkan perubahan sikap, namun masih berupa diskursus. Perlu adanya komitmen berupa dokumen legal tertulis atau berupa perjanjian baru, yang dapat mengikat pemerintah Negara Korea Selatan dan Jepang. Belum adanya perjanjian terbaru untuk merevisi perjanjian Japan-ROK Agreement tahun 2015, menandakan bahwa The Korean Council dan Jaringan Advokasi Transnasional RMCW belum berhasil mengimplementasikan strategi *Accountability Politics*.

Dalam transnasionalisme pergerakan RMCW memiliki kesamaan nilai dan tujuan. Benang merah dari *framing* yang dibentuk melalui strategi *Information Politics* dan *Symbolic Politics* tersebut adalah pentingnya HAM dan perdamaian. Tindakan Jepang yang melakukan perekrutan budak seksual dan mengirimkan Comfort Women ke negara lain bagian dari tindakan pelanggaran HAM berat. Meninjau dari Statuta Roma pasal 7, tindakan Jepang tersebut termasuk bagian dari pelanggaran HAM dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (ICC (International Criminal Court), 2021). HAM merupakan moralitas paling mendasar untuk melindungi martabat manusia (Forsythe, 2012: 3). HAM bersifat universal karena merupakan martabat yang dimiliki oleh semua manusia, sehingga terdapat hukum internasional yang mengikat negara untuk memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan HAM kepada masyarakatnya (Donnelly, 2013: 32–126). Siapapun yang tidak patuh terhadap *universal norms*, dalam konteks ini adalah HAM, maka akan dianggap menyimpang dari norma. Pemberian istilah penyimpangan terhadap nilai HAM menjadi strategi *Mobilization of Shame* yang dapat menekan pemerintah Jepang dan Korea Selatan. The Korean Council menggunakan moral leverage dalam strategi *Leverage Politics*. Membingkai isu Comfort Women sebagai isu HAM yang bersifat universal, bertujuan untuk memberikan pesan bahwa isu ini bukan hanya sekedar isu sejarah. Artinya, isu ini masih relevan untuk diperjuangkan hingga saat ini, bukan hanya tersegmentasi pada negara yang dijajah oleh Jepang saja.

KESIMPULAN

Jejaring transnasionalisme *Redress Movement for Comfort Women* (RMCW) dapat terbangun di negara barat karena NGO The Korean Council mengimplementasikan empat strategi TAN dan Skema *Boomerang Pattern*. The Korean Council (TKC) membangun jejaring transnasional di negara barat, dengan tujuan untuk mencari jalan alternatif agar tercapainya tujuh tuntutan dalam pergerakan RMCW. Menggunakan jalan alternatif ini perlu dilakukan

oleh TKC karena adanya *blockages* yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Jalan alternatif yang dimaksud adalah implementasi skema *boomerang pattern* yang merupakan manifestasi dari strategi *leverage politics*. Tujuan dilakukannya *leverage politics* yakni tercapainya *political effectiveness* yang merupakan manifestasi strategi *Accountability Politics*. TKC perlu mengimplementasikan strategi *Information Politics* dan *Symbolic Politics* terlebih dahulu untuk mendapatkan pengaruh dari NGO di negara barat.

TKC berhasil mengimplementasikan strategi *Information Politics*, *Symbolic Politics*, dan *Leverage Politics* yang dibuktikan dengan terjalannya relasi dengan sembilan NGO di negara barat. NGO tersebut tersebar di negara Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Australia. NGO dinegara barat juga melakukan *Leverage Politics* ke pemerintah negaranya. Keputusan pemerintah negara barat menjadi tekanan kepada Jepang. Selain ke pemerintah negaranya, NGO di negara barat melakukan *leverage politics* ke IGO seperti CEDAW. Keberhasilan *leverage* tersebut, dibuktikan dengan laporan tahunan yang diberikan aktor non negara kepada CEDAW dan resolusi yang diberikan oleh CEDAW. Keberhasilan implementasi strategi *Leverage Politics* ini dikarenakan menggunakan HAM yang merupakan *Universal Norms*. Dengan tekanan yang diberikan oleh jejaring transnasional, terdapat perubahan sikap pada pemerintah Korea Selatan, namun hingga saat ini masih belum ada perubahan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Artinya, hingga saat ini TKC belum berhasil mengimplementasikan strategi *Accountability Politics*, karena belum adanya komitmen yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan.

REFERENSI

Buku

- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell University Press. Diambil dari www.cornellpress.cornell.edu.
- Forsythe, D. P. (2012). *Human Rights in International Relations* (3 ed.). New York: Cambridge Press University.
- Margareth E. Keck, & Kathryn Sikkink. (2014). *Activist Beyond Borders*. Cornell University Press.
- Qiu, P., Su, Z., & Chen, L. (2013). *Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan's Sex Slaves*. University of British Columbia Press. New York: Oxford University Express.
- Rosyidin, M. (2019). *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Tanaka, Y. (2002). *Japan 's Comfort Women*. Routledge.
- Tanaka, Y. (2018). *Hidden Horrors : Japanese War Crimes in World War II*. New York: Routledge.
- The Korean Council. (2020). *A to Z Guide for just Resolution of the Japanese Military Sexual Slavery Issue*. Mapo-gu, Seoul: The Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan.
- Artikel dari Jurnal/ Berita/ Website** APNews. (2020). Berlin district to keep 'comfort women' statue for now. Diambil dari <https://apnews.com/article/world-war-ii-local-governments-berlin-japan-europe-ef848ed764b304f3062b7633aa719720>
- BBC. (2017). San Francisco Accepts "Comfort Women" Statue. *BBC*. Diambil dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-42092477>
- Board of Supervisors of the City and the County of San Francisco. (2021). *Denouncing the Article, "Contracting for Sex in the Pacific War," by J. Mark Ramseyer of the Japanese Legal Studies at Harvard Law School*. Diambil dari <https://sfbos.org/resolutions-2021>
- Broad, R., & Turnbull, N. (2019). From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK. *European Journal on Criminal*

- Policy and Research*, 25, 119–133.
<https://doi.org/https://doi.org.proxy.undip.ac.id/10.1007/s10610-018-9375-4>
- Burnier, D. (1994). Constructing Political Reality: Language, Symbols, and Meaning in Politics. *Political Research Quarterly*, 47(1), 238–253.
- CEDAW. (2009). *Japan The “Comfort Women” Issue*. New York. Diambil dari https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/comfortwomen_japan_cedaw44.pdf
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2016). *Concluding Observations on the Combined Seventh and Eighth Periodic Reports of Japan*. Diambil dari https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/JPN/CO/7-8&Lang=En
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (2016). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Diambil dari https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/JPN/CO/7-8&Lang=En
- Cox, L. (2015). Scholarship and Activism: A Social Movements Perspective. *studies in Social Justice*, 9(1), 34–54.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell University Press. Diambil dari www.cornellpress.cornell.edu.
- Forsythe, D. P. (2012). *Human Rights in International Relations* (3 ed.). New York: Cambridge Press University.
- ICC (International Criminal Court). Rome Statute, Pub. L. No. Article, 3 (2021). The Hague, Netherland. <https://doi.org/92-9227-386-8>
- Junichiro, S. (2021). Thoughts on the “Comfort Women Statue” in Berlin. *The National Institute for Defense Studies (NIDS)*, 161, 1–9. Diambil dari <http://www.nids.mod.go.jp/english/>
- Kaufman, S. J. (2019). War as Symbolic Politics. *International Studies Quarterly*, 63(3), 614–625.
- Lee, J., & Ham, D. L. (2020). Tracing 28 Years of the Redress Movement Led by the Washington Coalition for Comfort Women Issues. In P. G. Min, T. R. Chung, & S. S. Yim (Ed.), *The Transnational Redress Movement for the Victims of Japanese Military Sexual Slavery* (hal. 117–148). Diambil dari <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110643480/html>
- Margareth E. Keck, & Kathryn Sikkink. (2014). *Activist Beyond Borders*. Cornell University Press.
- McCurry, J. (2018). Osaka Drops San Francisco as Sister City over “Comfort Women” Statue. *The Guardian*. Diambil dari <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/04/osaka-drops-san-francisco-as-sister-city-over-comfort-women-statue>
- Min, P. G. (2003). Korean “Comfort Women”: The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class. *Gender and Society*, 17, 938–957.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2021). *Japan’s Efforts on the issue of Comfort Women*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/policy/postwar/page22e_000883.html
- Qiu, P., Su, Z., & Chen, L. (2013). *Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan’s Sex Slaves*. University of British Columbia Press. New York: Oxford University Express.
- Rosyidin, M. (2019). *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Suluh Media.

- Shin, H. (2021, April 21). S.Korea court dismisses “comfort women” lawsuit, contradicts earlier ruling. *REUTERS*. Diambil dari [https://www.reuters.com/world/china/skorea-court-dismisses-comfort-women-lawsuit-contradicts-earlier-ruling-2021-04-21/#:~:text=SEOUL%2C April 21 \(Reuters\),ordered Tokyo to compensate victims](https://www.reuters.com/world/china/skorea-court-dismisses-comfort-women-lawsuit-contradicts-earlier-ruling-2021-04-21/#:~:text=SEOUL%2C%20April%2021%20(Reuters),ordered%20Tokyo%20to%20compensate%20victims.).
- Soh, C. S. (1996). The Korean “Comfort Women”: Movement for Redress. *Asian Survey*, 36, 1226–1240.
- Tanaka, Y. (2018). *Hidden Horrors : Japanese War Crimes in World War II*. New York: Routledge.
- The Korean Council. (n.d.-a). *Butterfly Across The World*. Diambil dari <http://womenandwar.net/kr/wp-content/uploads/2019/01/2018-jeonguiyeon-yeongmunsinmun-wan.pdf>
- The Korean Council. (n.d.-b). Prevention of recurrence of wartime sexual violence. Diambil 13 Januari 2021, dari http://womenandwar.net/kr/activity/#activity_06
- The Korean Council. (2011). Join The 1000th Wednesday Demonstration. *Global Action Day : Justice for Comfort Women*. Diambil dari https://www.koreaverband.de/wp-content/uploads/2011/07/ComfortWomen_1000Dem_PR-from-Korea_Dec2011.pdf
- The Korean Council. (2020a). *A to Z Guide for just Resolution of the Japanese Military Sexual Slavery Issue*. Mapo-gu, Seoul: The Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan.
- The Korean Council. (2020b). Aktivitas The Korean Council. Diambil dari https://womenandwar.net/kr/activity/#activity_03
- Yonhap. (2021). Moon vows continued efforts to resolve comfort women issue on memorial day. *The Korea Herald*. Diambil dari <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210814000046>

Dokumen Lainnya

- ICC (International Criminal Court). Rome Statute, Pub. L. No. Article, 3 (2021). The Hague, Netherland. <https://doi.org/92-9227-386-8>.